

B. Saran

1. Bagi pasangan suami isteri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga keharmonisan didalam rumah tangga senantiasa terjaga.
2. Kepada praktisi hukum agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat di dalam mensosialisasikan pelaksanaan hukum penyelesaian sengketa harta bersama.
3. Untuk mencegah terjadinya polemik harta bersama dalam suatu perkawinan, disarankan agar akta nikah disertai dengan ketentuan tentang harta bersama dalam perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan, 2006.

B. Buku

Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Jakarta.

Abdur Rahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amrul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih , UU No, 1/1974 Sampai KHI*, Kencana Jakarta.

Asfinawati, Et. Al, Oktober 2004, “ *Bila anda Harus cerai: Hak-hak Perempuan Sekitar Perceraian*”, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, cetakan Ke-1, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Bustanul Arifin, 1996, “ *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*” Gema Insani Press, Jakarta.
- Fatimah, Et. Al, 2006, “ *Harta Gono-gini: Mencari Formula yang Adil Untuk Perempuan*”, Rahimah Jakarta, Cetakan 1, Jakarta.
- Gayus Lumbun, 2004, *Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia*, Business Information Services, Jakarta.
- H.M.A Tihami, dan Sohari Sahrani 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Pewarisan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975*, Cet 1, CV, Zahir Trading Co, Medan.
- _____, 1993/1994, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Dirbimpera dan Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, “*Hukum Acara Perdata*”, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muttaqin, 1992, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 2, Uli Pres, Yogyakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1990, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 1979, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soermiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1979, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika Jakarta.

Syahlani, Hensyah, 2007 “*Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*”, Yogyakarta.

Wirjono Projodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Internusa, Jakarta.

Zahri Hamid, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.